

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Singkawang
 Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang Dinilai : 2018-2022
 Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan
 : 2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
 : 3. Menurunnya Kawasan Genangan Banjir
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib
 OPD yang Dinilai : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				e						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	Tujuan Strategis: Meningkatnya Sumber Daya Air, Udara dan Tutupan Lahan									
1	Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan RTRW	Data dan Informasi yang tidak valid.		Kepala Dinas	Kurangnya sosialisasi koordinasi	Eksternal	C	Waktu yang di butuhkan dalam pekerjaan cukup lama.	
		Rasio RTH	Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi terlambat		Kepala Dinas	Terbatasnya dan terlambatnya suplay material dan peralatan serta cuaca	Eksternal	C	Pembangunan terlambat	
			Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi		Kepala Dinas	Keadaan lokasi dilapangan tidak memungkinkan sesuai perencanaan, kurang telitinya pelaksana kegiatan	Eksternal	C	Pekerjaan tidak sesuai perencanaan	
			Adanya temuan BPK.		Kepala Dinas	Ketidakhahaman, kelalaian ataupun kecurangan pelaksana kegiatan	Eksternal	C	Kegiatan tidak sesuai ketentuan, rawan terjadi penyimpangan dan potensi kerugian daerah	
			Tanaman yang di tanam mati		Kepala Dinas	Kondisi cuaca dan tanah tempat penanaman	Eksternal	UC	Jumlah tidak mencukupi	
			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C		
			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		

			Pengaturan lelang oleh internal dan eksternal.		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
II	Tujuan Strategis: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur									
1	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase jalan mantap	Terjadi permasalahan dalam hal pembebasan lahan		Kepala Dinas	Terdapat oknum masyarakat yang menolak untuk pembebasan lahan	Eksternal	UC	Terhambatnya pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan	
			Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang terlambat		Kepala Dinas	Terbatasnya dan terhambatnya suplai material dan peralatan, cuaca ekstrem (Hujan terus menerus, banjir) adanya perubahan design struktur.	Eksternal	UC	Pembangunan terlambat	
			Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi (Kontrak)		Kepala Dinas	Cara pengerjaan dan bahan material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Eksternal		Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan	
			Infrastruktur jalan rusak		Kepala Dinas	Kelebihan beban yang tidak sesuai dengan struktur bangunan	Eksternal	UC	Kerusakan bangunan jalan	
			Penyelesaian pekerjaan konstruksi yang terlambat		Kepala Dinas	Terbatasnya dan terhambatnya suplai material dan peralatan, cuaca ekstrem (Hujan terus menerus, banjir) adanya perubahan design struktur. Terbatasnya peralatan, dan material.	Eksternal	UC	Terlambatnya pelaporan dan penyerapan anggaran.	
			Infrastruktur jembatan rusak.		Kepala Dinas	Kelebihan beban yang tidak sesuai dengan struktur bangunan	Eksternal	UC	Kerusakan bangunan jembatan	
			Adanya titipan proyek saat Penyusunan KAK, Penyusunan usulan DAK Fisik oleh Pemda, Pemberian Rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh Kepala Daerah		Kepala Dinas	Adanya arahan dari DPR	Eksternal	C	Kurang optimalnya dalam pencapaian tujuan.	
			Penggunaan DAK tidak sesuai dengan peruntukannya		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C	Kurang optimalnya dalam pencapaian tujuan.	
			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C	Dokumen tidak sesuai dengan realisasi fisik dan keuangan.	

			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		
			Pemotongan DAK untuk kepentingan pribadi		Kepala Dinas	Intervensi dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Adanya titipan proyek kepada anggota DPR pada saat Pembahasan Usulan Program yang didanai dari DAK Fisik		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Pengaturan lelang oleh internal dan eksternal.		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
2	Meningkatnya akses penduduk terhadap pelayanan air minum	Persentase masyarakat pengguna air bersih	Pelaksanaan pekerjaan dapat mengganggu lalu lintas kendaraan		Kepala Dinas	Karna adanya galian tanah	Eksternal	C	Potensi kecelakaan lalu lintas	
			1. Rusaknya infrastruktur di sekitar pekerjaan. 2. Rusaknya infrastruktur bangunan masyarakat.		Kepala Dinas	Karna adanya pipa yang melintasi jalan	Eksternal	C	1. Mengganggu kelancaran lalu lintas 2. Masyarakat meminta ganti rugi	
			Adanya titipan proyek saat Penyusunan KAK, Penyusunan usulan DAK Fisik oleh Pemda, Pemberian Rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh Kepala Daerah		Kepala Dinas	Adanya arahan dari DPR	Eksternal	C		
			Penggunaan DAK tidak sesuai dengan peruntukannya		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C		
			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		
			Pemotongan DAK untuk kepentingan pribadi		Kepala Dinas	Intervensi dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Adanya titipan proyek kepada anggota DPR pada saat Pembahasan Usulan Program yang didanai dari DAK Fisik		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		

			Pengaturan lelang oleh internal dan eksternal.		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
3	Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Persentase bangunan gedung pemerintahan yang memenuhi syarat	Menghambat kelancaran lalu lintas		Kepala Dinas	Mobilisasi material	Eksternal	C	Kemacetan lalu lintas	
			Dengan adanya pembangunan gedung dapat menimbulkan kebisingan disekitar lokasi pembangunan.		Kepala Dinas	Proses pembangunan gedung	Eksternal	C	Keluhan masyarakat akan kebisingan dari proses pekerjaan	
			Menghambat kelancaran lalu lintas		Kepala Dinas	Tidak adanya lahan untuk penyimpanan material sehingga material menumpuk di bahu jalan.	Eksternal	C	Mengganggu kelancaran lalu lintas	
			Adanya titipan proyek saat Penyusunan KAK, Penyusunan usulan DAK Fisik oleh Pemda, Pemberian Rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh Kepala Daerah		Kepala Dinas	Adanya arahan dari DPR	Eksternal	C		
			Penggunaan DAK tidak sesuai dengan peruntukannya		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C		
			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		
			Pemotongan DAK untuk kepentingan pribadi		Kepala Dinas	Intervensi dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Adanya titipan proyek kepada anggota DPR pada saat Pembahasan Usulan Program yang didanai dari DAK Fisik		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Pengaturan lelang oleh internal dan eksternal.		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
4	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	Masyarakat meminta ganti rugi		Kepala Dinas	Lahan yang dipergunakan untuk bangunan irigasi rata-rata termasuk kedalam lahan masyarakat	Eksternal	C	Pelaksanaan pekerjaan mengalami keterundaan	

			Adanya komplein masyarakat petani karena kerusakan tanaman dan masyarakat meminta ganti rugi yang disebabkan pekerjaan rehab jaringan irigasi		Kepala Dinas	Pelaksanaan pekerjaan bertepatan dengan masa tanam padi	Eksternal	C	Pelaksanaan pekerjaan mengalami ketertundaan	
			Adanya titipan proyek saat Penyusunan KAK, Penyusunan usulan DAK Fisik oleh Pemda, Pemberian Rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh Kepala Daerah		Kepala Dinas	Adanya arahan dari DPR	Eksternal	C		
			Penggunaan DAK tidak sesuai dengan peruntukannya		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C		
			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		
			Pemotongan DAK untuk kepentingan pribadi		Kepala Dinas	Intervensi dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Adanya titipan proyek kepada anggota DPR pada saat Pembahasan Usulan Program yang didanai dari DAK Fisik		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Pengaturan lelang oleh internal dan eksternal.		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
5	Meningkatnya permukiman dengan infrastruktur memadai	Persentase permukiman berinfrastruktur memadai	- Standar Mutu Pekerjaan Konstruksi - Standar Mutu Keselamatan Kerja Konstruksi		Kepala Dinas	Perilaku personil yang belum terbiasa dengan standar prosedur yang seharusnya	Eksternal	C	Pekerjaan menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang ingin dicapai serta tingginya tingkat fatalitas kecelakaan kerja	Pengguna Jalan, Pekerja dan Masyarakat umum
			Adanya titipan proyek saat Penyusunan KAK, Penyusunan usulan DAK Fisik oleh Pemda, Pemberian Rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh Kepala Daerah		Kepala Dinas	Adanya arahan dari DPR	Eksternal	C		
			Penggunaan DAK tidak sesuai dengan peruntukannya		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		

			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C		
			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		
			Pemotongan DAK untuk kepentingan pribadi		Kepala Dinas	Intervensi dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Adanya titipan proyek kepada anggota DPR pada saat Pembahasan Usulan Program yang didanai dari DAK Fisik		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Pengaturan lelang oleh internal dan eksternal.		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
6	Meningkatnya kawasan yang tertata	Persentase kawasan yang tertata	Adanya titipan proyek saat Penyusunan KAK, Penyusunan usulan DAK Fisik oleh Pemda, Pemberian Rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh Kepala Daerah		Kepala Dinas	Adanya arahan dari DPR	Eksternal	C		
			Penggunaan DAK tidak sesuai dengan peruntukannya		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C		
			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		
			Pemotongan DAK untuk kepentingan pribadi		Kepala Dinas	Intervensi dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Adanya titipan proyek kepada anggota DPR pada saat Pembahasan Usulan Program yang didanai dari DAK Fisik		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		

			Rekayasa proses lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
7	Meningkatkan kualitas pengawasan teknis dan pembinaan jasa konstruksi daerah	Persentase perusahaan jasa konstruksi yang layak	Adanya titipan proyek saat Penyusunan KAK, Penyusunan usulan DAK Fisik oleh Pemda, Pemberian Rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh Kepala Daerah		Kepala Dinas	Adanya arahan dari DPR	Eksternal	C		
			Penggunaan DAK tidak sesuai dengan peruntukannya		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C		
			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		
			Pemotongan DAK untuk kepentingan pribadi		Kepala Dinas	Intervensi dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Adanya titipan proyek kepada anggota DPR pada saat Pembahasan Usulan Program yang didanai dari DAK Fisik		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Rekayasa proses lelang untuk memenangkan salah satu peserta lelang		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
8	Terlaksananya penyediaan sistem pengelolaan persampahan regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan regional	Sampah organik dan non organik tidak di pisah		Kepala Dinas	Kurang tersedianya bak khusus sampah organik dan non organik yang terdapat di TPS	Eksternal	C	Sampah yang ada sulit untuk di uraikan/di pisah.	Masyarakat umum
			Adanya titipan proyek saat Penyusunan KAK, Penyusunan usulan DAK Fisik oleh Pemda, Pemberian Rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh Kepala Daerah		Kepala Dinas	Adanya arahan dari DPR	Eksternal	C		
			Penggunaan DAK tidak sesuai dengan peruntukannya		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C		

			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		
			Pemotongan DAK untuk kepentingan pribadi		Kepala Dinas	Intervensi dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Adanya titipan proyek kepada anggota DPR pada saat Pembahasan Usulan Program yang didanai dari DAK Fisik		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Pengaturan lelang oleh internal dan eksternal.		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
III	Tujuan Strategis: Menurunnya kawasan genangan banjir									
1	Sasaran Strategis: Terkendalnya Banjir	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Saluran drainase roboh ataupun tersumbat akibat sedimentasi		Kepala Dinas	Tidak Tertampungnya volume air pada saluran	Eksternal	C	Terjadinya genangan/banjir	Masyarakat
			Adanya titipan proyek saat Penyusunan KAK, Penyusunan usulan DAK Fisik oleh Pemda, Pemberian Rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh Kepala Daerah		Kepala Dinas	Adanya arahan dari DPR	Eksternal	C		
			Penggunaan DAK tidak sesuai dengan peruntukannya		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Rekayasa dokumen pertanggungjawaban Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan dibuat 100% namun pekerjaan fisik belum		Kepala Dinas	Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan pemeriksaan fisik dan hanya sekedar tanda tangan berita acara	Eksternal	C		
			Terjadinya kenaikan harga material.		Kepala Dinas	1. Persekongkolan antara para peserta lelang sehingga harga wajar tidak terbentuk 2. Panitia Pemeriksa Barang tidak cermat dalam melaksanakan pemeriksaan barang	Eksternal	C		
			Pemotongan DAK untuk kepentingan pribadi		Kepala Dinas	Intervensi dari pihak terkait	Eksternal	C		
			Adanya titipan proyek kepada anggota DPR pada saat Pembahasan Usulan Program yang didanai dari DAK Fisik		Kepala Dinas	Kesengajaan dari pihak terkait	Eksternal	C		

			Pengaturan lelang oleh internal dan eksternal.		Kepala Dinas	Adanya arahan dari pihak tertentu untuk memenangkan salah satu peserta lelang	Eksternal	C		
--	--	--	--	--	--------------	---	-----------	---	--	--

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi